

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sahara Barat yang menjadi salah satu wilayah konflik di Kawasan Afrika Utara atau yang juga disebut dengan wilayah ‘Maghreb’. Konflik yang terjadi di Sahara Barat adalah konflik teritorial (*territorial dispute*) antara Maroko dan Republik Saharawi Barat yang ingin merdeka. Kondisi ini kemudian menjadikan perpolitikan wilayah Sahara Barat tidak stabil dan tidak ada jaminan terhadap damainya kondisi wilayah dikarenakan konflik yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Meskipun berbagai cara telah dilakukan oleh rezim internasional dan berbagai negara untuk meredakan konflik dengan mencoba untuk menyatukan pikiran dalam berbagai resolusi, namun konflik yang terjadi di Sahara Barat belum menemukan titik temu yang dapat disepakati oleh semua pihak (Tantowi & Iskandar, 2015). Konflik di Sahara Barat dimulai pada tahun 1975, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk mensponsori referendum untuk penentuan nasib sendiri penduduk Sahara Spanyol, tetapi Maroko dan Mauritania melakukan invasi ke wilayah Sahara Barat sebelum referendum yang dilakukan oleh PBB tercapai. (Diego Aguirre, 1991).

Wilayah yang dimaksud terletak di pantai barat Afrika, dibatasi oleh Maroko di utara, Mauritania di timur dan selatan, dan Aljazair di sudut timur laut. Satu-satunya batas alami adalah 700 mil garis pantai Atlantik. Oleh karena itu, klaim Maroko atas kedaulatan atas Sahara barat didasarkan pada ikatan historis yang bersifat politik-religius. Akibatnya, klaim tersebut berakar dalam konsep Islam tentang kesetiaan dan kedaulatan tersumpah suatu populasi ditambah dengan realitas Maroko. Hal ini kemudian yang menjadikan landasan awal dari Maroko terhadap wilayah Sahara Barat melalui gerakan yang dikenal sebagai “*Green March*”.

Arlan Faris, 2023

PBB DAN KONFLIK DI MAGHREB: Inefektivitas United Nations Mission For The Referendum In Western Sahara (MINURSO) Terkait Penyelesaian Konflik Di Sahara Barat Antara Kerajaan Maroko dan Frente Popular De Liberación De Saguía el Hamra y Río de Oro (Front POLISARIO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Gambar I.1 Foto gerakan *Green March* oleh Maroko pada tahun 1975.



(Sumber: Hakking, 2020)

Ekspansi ini di inisiasikan oleh Raja Maroko pada saat itu yaitu Hasan II dengan mengerahkan 350,000 pasukan dan rakyat Maroko untuk menjadi relawan untuk menduduki wilayah Sahara Barat sebagai kelanjutan dari klaim Maroko atas kedaulatan teritorial terhadap wilayah tersebut (Issaev & Zakharov, 2022).

Pada bulan Oktober 1975 Spanyol memulai negosiasi penduduk Saharawi yang memulai pemberontakan gerilya untuk lepas dari kolonial Spanyol semenjak tahun 1973. Maroko, yang terletak di utara Sahara Barat, berpendapat bahwa wilayah ini pada dasarnya adalah bagian dari Maroko karena ikatan sejarah. Sedangkan, ICJ (International Court of Justice) tidak menemukan ikatan kedaulatan teritorial antara wilayah yang disengketakan atau Maroko pada saat kolonisasi wilayah tersebut oleh Spanyol (Zoubir, 2018).

Arlan Faris, 2023

PBB DAN KONFLIK DI MAGHREB: Inefektivitas United Nations Mission For The Referendum In Western Sahara (MINURSO) Terkait Penyelesaian Konflik Di Sahara Barat Antara Kerajaan Maroko dan Frente Popular De Liberación De Saguía el Hamra y Río de Oro (Front POLISARIO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Dalam putusan ICJ berdasarkan hasil dari penyelidikannya, tidak ada hubungan yang cukup kuat untuk mendukung klaim wilayah Sahara Barat. ICJ berpendapat bahwa Sahrawi, sebagai penduduk asli, adalah pemilik teritori tersebut. Karena itu, kaum Sahrawi memiliki hak untuk memutuskan apakah mereka ingin diintegrasikan menjadi bagian dari Maroko, atau merdeka menjadi suatu negara (Ducci, 2019). PBB kemudian mengunjungi wilayah Sahara Barat dan menyimpulkan bahwa mayoritas dukungan untuk kemerdekaan menjadi negara sendiri dari masyarakat Saharawi dan kemudian ICJ mengeluarkan keputusannya pada 16 Oktober 1975.

Keputusan ICJ tersebut kemudian mendapat tanggapan langsung dari Hassan II yang merupakan Sultan dari Maroko dan kemudian membentuk kebijakan untuk melaksanakan rencana untuk menyatukan kembali Sahara Barat ke dalam wilayah Maroko. Hassan II tidak mengacu pada keputusan ICJ tentang hak untuk menentukan nasib sendiri dari Sahrawi, melainkan menggunakan hubungan sebelumnya antara Sahrawi dan Maroko sebagai pembenaran atas tindakannya. Dalam menyajikan kasusnya untuk Sahara barat ke ICJ, Maroko menunjukkan pembagian negara menjadi apa yang oleh sejarawan Maroko pra-protektorat disebut *bilad al-makhzan* (tanah makhzan, atau wilayah kekuasaan sultan) dan *bilad al-siba* (daerah-daerah di luar kekuasaan sultan) (Aitkadi, 2020).

Konteks konflik teritorial ini kemudian terjadi dikarenakan wilayah Sahara Barat memiliki pergerakan nasionalisme yang ingin berdiri menjadi negara merdeka tersendiri di bawah Republik Saharawi Barat. Pergerakan ini meningkat semenjak tahun 1973 dimana pada saat itu pengaruh dari Spanyol di Sahara Barat mulai melemah dan masyarakat Saharawi bergabung untuk membentuk pergerakan POLISARIO (*Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro*). Front POLISARIO didirikan sebagai gerakan pembebasan Sahara Barat yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan kawasan Sahara Barat dari koloni Spanyol. Kekuatan pergerakan ini semakin besar karena terjadinya peningkatan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Sahara Barat sehingga pada akhirnya pada tahun 1975 Spanyol mundur dari wilayah ini.

Arlan Faris, 2023

PBB DAN KONFLIK DI MAGHREB: Inefektivitas United Nations Mission For The Referendum In Western Sahara (MINURSO) Terkait Penyelesaian Konflik Di Sahara Barat Antara Kerajaan Maroko dan Frente Popular De Liberación De Saguía el Hamra y Río de Oro (Front POLISARIO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Dengan mundurnya Spanyol sehingga wilayah ini menjadi wilayah *terra nullius* dalam istilah hukum romawi yang memiliki arti tanah tak bertuan, sehingga POLISARIO kemudian memproklamkan berdirinya Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR). Namun, dengan berdirinya SADR ternyata belum membuat masalah di Sahara Barat berakhir karena ternyata Spanyol menyerahkan koloni tersebut pada Maroko. Masyarakat Saharawi kembali mengalami penjajahan akibat pendudukan Maroko, dimana Maroko melakukan represi dan tindakan diskriminatif terhadap penduduk asli Sahara. Hal ini meningkatkan pelanggaran HAM di wilayah tersebut akibat pendudukan dari Maroko (Porges, 2019).

Maroko membangun tembok sepanjang 2.700 km yang membelah Sahara Barat dalam zona pesisir yang diduduki Maroko dan bagian dalam yang dikuasai Republik Saharawi (Geissler, 2018).

Gambar I.2 Foto tembok perbatasan Sahara Barat dan Maroko.



(Sumber: Patowary, 2017)

Dikarenakan eskalasi konflik yang terus meningkat pada tahun 1988, Maroko dan Front POLISARIO menandatangani Proposal Penyelesaian di bawah naungan Sekretaris Jenderal PBB Pérez de Cuéllar dan misi penjaga perdamaian yaitu MINURSO (*United Nations Mission for the*

Arlan Faris, 2023

PBB DAN KONFLIK DI MAGHREB: Inefektivitas United Nations Mission For The Referendum In Western Sahara (MINURSO) Terkait Penyelesaian Konflik Di Sahara Barat Antara Kerajaan Maroko dan Frente Popular De Liberación De Saguía el Hamra y Río de Oro (Front POLISARIO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Referendum in Western Sahara) yang dikerahkan untuk mengawasi gencatan senjata antara kedua belah pihak dan untuk memfasilitasi penyelenggaraan referendum (Theofilopoulou, 2020).

Kasus Sahara Barat menggambarkan sejauh mana politik kekuasaan telah membayangi upaya penyelesaian konflik di Afrika Utara. Maroko mendasarkan strateginya pada pemblokiran solusi apapun yang menantang kendalinya atas Sahara Barat. Di sisi lain, sejak awal proses perdamaian, POLISARIO telah mendukung semua proposal perdamaian yang disponsori PBB untuk menyelesaikan konflik Sahara Barat. Banyak akademisi hubungan internasional menganggap MINURSO (*United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara*) sebagai misi penjaga perdamaian PBB yang gagal sejak tahap awal pembentukannya. Memang benar bahwa PBB mencapai dan mempertahankan gencatan senjata selama pengerahan misi, tetapi hal tersebut tidak mencerminkan suksesi mandat asli dari terbentuknya MINURSO (Ritschel, 2020).

MINURSO tidak memenuhi dan belum mencapai mandat misi, dan intervensi tersebut tidak menghasilkan penyelesaian damai dalam jangka yang sangat panjang. Oleh karena itu, MINURSO bukanlah misi penjaga perdamaian yang berhasil. MINURSO menghadapi lebih banyak kesulitan situasional dalam mencoba menyelesaikan konflik karena pihak-pihak yang bertikai kurang dapat bekerja sama dalam proses penyelesaian damai. Baik POLISARIO maupun Maroko memiliki dukungan eksternal secara strategis sehingga mereka tetap berdiri pada kehendaknya masing-masing. Selain itu, MINURSO kurang mendapat perhatian internasional dan mempengaruhi keberhasilan misi (Novais, 2020).

Tekanan untuk mengakhiri konflik dari komunitas global seringkali mempercepat keberhasilan misi perdamaian. Jika suatu perselisihan hanya mendapat sedikit perhatian internasional, konflik dapat berlanjut untuk jangka waktu yang lebih lama dan hal ini yang terjadi terhadap MINURSO. MINURSO dinilai belum efektif dalam menangani konflik Maroko dan Sahara Barat hingga kini bahkan setelah mendapat beberapa perpanjangan mandat dari DK PBB dan yang terbaru adalah melalui Resolusi 2602. Banyak kritik terhadap resolusi ini dikarenakan DK PBB kurang menekan Maroko dalam mandat perpanjangan dari MINURSO ini.

Arlan Faris, 2023

PBB DAN KONFLIK DI MAGHREB: Inefektivitas United Nations Mission For The Referendum In Western Sahara (MINURSO) Terkait Penyelesaian Konflik Di Sahara Barat Antara Kerajaan Maroko dan Frente Popular De Liberación De Saguía el Hamra y Río de Oro (Front POLISARIO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Aktor lain yang dapat terlibat agar mempercepat penyelesaian konflik ini adalah Uni Afrika, yang mungkin potensi peran kedepannya dikarenakan Maroko meminta agar diterima kembali menjadi anggota Uni Afrika. Selama tiga dekade, Maroko telah mempertahankan ketidakhadirannya sebagai protes atas keanggotaan Sahara Barat.

Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat argumen penulis mengenai latar belakang penelitian yang diambil, penulis akan menyertakan beberapa *literature review* penelitian sebelumnya mengenai peran MINURSO dalam menangani konflik di Sahara Barat. Yang pertama adalah jurnal dari Anna Khakee (2014) yang berjudul **The MINURSO Mandate, Human Rights, and the Autonomy Solution for Western Sahara**. Penelitian di dalam jurnal ini memfokuskan terhadap kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh MINURSO dalam lingkup HAM atau disebut dengan *Human Rights Monitoring*. Penelitian ini menyoroti bagaimana pengawasan terhadap HAM ini idealnya sangat dibutuhkan dan masyarakat internasional seperti NGO internasional dan sekjen PBB telah meningkatkan tekanan kepada Maroko untuk menerima resolusi mengenai mekanisme pemantauan HAM dari wilayah yang dikelola Maroko dan kamp-kamp yang dikelola POLISARIO di Aljazair, dikarenakan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang serius di kedua belah pihak.

Jurnal berargumen bahwa dimasukkannya mekanisme hak asasi manusia tidak hanya akan menjadi tanda itikad baik dan membantu membangun kepercayaan yang sangat dibutuhkan di antara Maroko dan juga POLISARIO. Menurut Khakee, ada Tiga poin utama mengapa Maroko hingga sekarang menolak adanya program pengawasan HAM. Pertama, penghormatan terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai *sine qua non* untuk otonomi yang berfungsi. Kedua, ketika otonomi teritorial dan bentuk-bentuk otonomi lainnya dibahas di tingkat internasional, hal itu umumnya dalam kerangka HAM. Ketiga, ketakutan bahwa pemantauan HAM akan melemahkan kedaulatan Maroko atas wilayah tersebut tampaknya berlebihan, karena pengaturan otonomi secara teratur memiliki mekanisme pengawasan internasional yang dibangun di dalamnya, paling tidak berkaitan dengan penghormatan terhadap HAM.

Arlan Faris, 2023

PBB DAN KONFLIK DI MAGHREB: Inefektivitas United Nations Mission For The Referendum In Western Sahara (MINURSO) Terkait Penyelesaian Konflik Di Sahara Barat Antara Kerajaan Maroko dan Frente Popular De Liberación De Saguía el Hamra y Río de Oro (Front POLISARIO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Meriem Naili (2020) dalam jurnalnya yang berjudul **The Absence of a Human Rights Monitoring Component in the Minurso Mandate: a Qualitative Analysis of the UN Narrative Regarding Human Rights in Western Sahara** kemudian menjelaskan dan membahas bagaimana MINURSO berdiri sebagai pengecualian di antara operasi pemeliharaan perdamaian mengenai ketentuan hak asasi manusia dan potensi hubungannya dengan keberadaan *status quo*. Perbedaan persepsi mengenai *status quo* Sahara Barat memperburuk implementasi program pengawasan HAM terhadap penduduk Saharawi. Untuk mempertegas kedaulatannya, di lain sisi Maroko telah mengusulkan otonomi luas untuk Sahara Barat. Hal ini berbeda dengan pandangan *status quo* dari Front POLISARIO yang bersikeras bahwa penduduk lokal, yang diperkirakan mencapai 350.000 hingga 500.000, memiliki hak untuk referendum.

Argumen utama dalam penelitian Naili ini adalah narasi hak asasi manusia yang tidak jelas dalam resolusi DK PBB tentang Sahara Barat, menjadi bukti kebuntuan politik yang sedang berlangsung dalam resolusi DK PBB mengenai konflik Sahara Barat.

Kurang efektifnya mandat dari MINURSO kemudian dijelaskan oleh Fernandez-Molina (2019) di dalam artikelnya yang berjudul **Momentum for Negotiations in Western Sahara will Fade**. Molina menjelaskan mengenai tidak berjalan dan progresifnya mandat awal dari MINURSO pada tahun 1991 untuk memberikan hak *self-determination* terhadap Sahara Barat. Resolusi yang dilakukan oleh DK PBB dalam memperpanjang mandat MINURSO dari tahun ke tahun merupakan istilah yang mirip dengan resolusi sebelumnya dalam dekade terakhir, termasuk kompromi dalam mendesak "solusi politik yang akan memberikan penentuan nasib sendiri rakyat Sahara Barat". Namun, Resolusi itu sekali lagi tidak memasukkan pemantauan hak asasi manusia ke dalam mandat MINURSO, yang kemudian selalu menjadi bahan perdebatan dalam forum DK PBB.

Hal ini kemudian dipersulit dengan adanya kepentingan dan juga persepsi yang berbeda dari Maroko. Maroko memandang konflik tersebut sebagai sengketa regional dengan Aljazair, pendukung utama POLISARIO. berbeda dari pihak-pihak yang berkonflik, Maroko dan Sahara

Arlan Faris, 2023

PBB DAN KONFLIK DI MAGHREB: Inefektivitas United Nations Mission For The Referendum In Western Sahara (MINURSO) Terkait Penyelesaian Konflik Di Sahara Barat Antara Kerajaan Maroko dan Frente Popular De Liberación De Saguía el Hamra y Río de Oro (Front POLISARIO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Barat merujuk pada penggambaran konflik Maroko sebagai konfrontasi regional dengan Aljazair daripada perselisihan antara Maroko dan kelompok Sahrawi.

José Maria Sydow de Barros (2020) melalui jurnalnya yang berjudul **Western Sahara: History, UN Acting and Foreign Interests**. Fokus pembahasan dalam jurnal ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa alasan utama yang memungkinkan kebuntuan penyelesaian konflik Sahara Barat. Hipotesis yang dibangun oleh penulis adalah terdapat dilema dalam setiap solusi konflik di Sahara Barat dikarenakan terdapat kepentingan politik-ekonomi, dan juga campur tangan atau kepentingan aktor geopolitik global yang menggunakan peran MINURSO sebagai perantaranya. Akhirnya, penulis menyimpulkan hal ini menjadi alasan utama yang menghambat solusi konflik di Sahara Barat. Hal ini kemudian berdampak terhadap efektivitas misi dari MINURSO itu sendiri di Sahara Barat.

Tidak signifikannya efektivitas dari MINURSO ini dilihat dari tidak ada kemajuan dalam negosiasi yang berlangsung mengenai mekanisme resolusi antara Maroko dan juga POLISARIO. Maroko mengajukan proposalnya untuk Sahara Barat, Daerah Otonomi Sahara, yang didasarkan pada pemberian otonomi Sahrawi, tetapi dalam kerangka kedaulatan Maroko dan menolak setiap solusi yang diusulkan referendum. Di sisi lain, Front POLISARIO mempresentasikan proposalnya sendiri, berdasarkan keinginannya untuk menentukan nasib sendiri dan merdeka melalui referendum. Sejak itu, tampaknya resolusi DK PBB tentang masalah Sahara Barat tampaknya mengalami kebuntuan dan hanya sebagai bentuk "menjalankan agenda" dalam setiap diskusinya.

Hal ini kemudian menimbulkan pembatasan terhadap mandat tahunan MINURSO, tanpa disertakan dengan usulan-usulan atau tindakan konkret apa pun yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah ini. Jurnal ini menyoroti tentang bagaimana keterlibatan aktor lain dalam mendukung Maroko seperti Perancis dan juga Amerika Serikat sebagai negara anggota permanen DK PBB. Dukungan Perancis melibatkan tindakan nyata di bidang militer dan ekonomi serta peran Perancis di dalam DK PBB yang menggunakan hak veto terhadap solusi Human Rights Monitoring di dalam resolusi DK PBB mengenai MINURSO. Referendum di Sahara Barat dapat

Arlan Faris, 2023

PBB DAN KONFLIK DI MAGHREB: Inefektivitas United Nations Mission For The Referendum In Western Sahara (MINURSO) Terkait Penyelesaian Konflik Di Sahara Barat Antara Kerajaan Maroko dan Frente Popular De Liberación De Saguía el Hamra y Río de Oro (Front POLISARIO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

berpengaruh terhadap politik internal Maroko menjadi tidak stabil, sekutu terbesar Perancis di Maghreb, dan akan berdampak hilangnya pengaruh Perancis di wilayah itu.

Anna Theofilopoulou (2020) menjelaskan dalam **The United Nations' Change in Approach to Resolving the Western Sahara Conflict since the Turn of the Twenty-First Century** mengenai peran PBB setelah 11 tahun, PBB belum menemukan solusi untuk konflik tersebut dan masih mengandalkan settlement plan dari James Baker sebagai landasan awal. Selain itu, frustrasi muncul terhadap situasi geopolitik di Sahara Barat dan Afrika Utara telah menambahkan dimensi baru yang mengkhawatirkan pada konflik, dikarenakan meningkatnya isu kekerasan dan terorisme. Dimensi baru dalam konflik ini adalah desakan POLISARIO dan para pendukungnya baik di masyarakat sipil maupun Dewan Keamanan untuk menambahkan *Human Rights Monitoring* ke dalam mandat MINURSO di Sahara Barat. Ini hanya mengakibatkan mengalihkan perhatian Dewan dari tugas utamanya menekan para pihak untuk bekerja pada solusi untuk konflik, tanpa memenuhi permintaan POLISARIO.

I.2. Rumusan Masalah

Analisis resolusi Dewan Keamanan sejak tahun 1975 tentang Sahara Barat mengungkapkan peningkatan referensi yang dibuat untuk istilah “*self-determination*” atau bahasa serupa ketika prospek referendum menghilang dan kebuntuan politik selama bertahun-tahun. Pengerahan MINURSO menandai titik awal yang jelas dari keterlibatan DK PBB dalam konflik sebagai pihak perdamaian dan pihak rekonsiliasi. Berdasarkan latar belakang topik, artikel ini membahas bagaimana MINURSO tidak efektif sebagai misi perdamaian dalam menjalankan mandatnya dan bagaimana tantangan yang dihadapi sebagai entitas penyelesaian antara pihak yang berkonflik. Dari penjelasan tersebut, hal ini menimbulkan pertanyaan: “**Mengapa Peran *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO) Kurang Efektif dalam menyelesaikan Konflik di Sahara Barat antara Kerajaan Maroko dan Frente *Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro* (Front POLISARIO)?**”

Arlan Faris, 2023

PBB DAN KONFLIK DI MAGHREB: Inefektivitas United Nations Mission For The Referendum In Western Sahara (MINURSO) Terkait Penyelesaian Konflik Di Sahara Barat Antara Kerajaan Maroko dan Frente Popular De Liberación De Saguía el Hamra y Río de Oro (Front POLISARIO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang telah penulis jelaskan di atas, hal ini kemudian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan mengetahui tantangan yang dihadapi oleh MINURSO sebagai misi perdamaian dari Dewan Keamanan PBB dalam mengatasi konflik teritorial antara Maroko dan Republik Sahrawi Barat mengenai sengketa wilayah Sahara Barat.

I.4. Manfaat Penelitian

Dari topik skripsi dan analisa yang dilakukan oleh penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti:

I.4.1. Manfaat Akademis

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi di bidang akademik terutama literatur hubungan internasional terkait konflik di Kawasan Afrika Utara dan bagaimana intervensi DK PBB menghadapi tantangan dalam mengatasi konflik yang terjadi, terutama konflik dari Sahara Barat yang hingga kini belum usai. Peneliti mengharapkan dapat memberikan kontribusi pandangan ilmu pengetahuan yang baru bagi civitas universitas, khususnya kepada mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) dan juga program studi Hubungan Internasional dari kampus lainnya.

I.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat menjadi saran dan informasi bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk memahami konflik yang terjadi di Sahara Barat dan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh MINURSO dalam menyelesaikan konflik di wilayah ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terhadap civitas akademika lainnya dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya.

Arlan Faris, 2023

PBB DAN KONFLIK DI MAGHREB: Inefektivitas United Nations Mission For The Referendum In Western Sahara (MINURSO) Terkait Penyelesaian Konflik Di Sahara Barat Antara Kerajaan Maroko dan Frente Popular De Liberación De Saguía el Hamra y Río de Oro (Front POLISARIO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

I.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang dari topik penelitian mengenai bagaimana terjadinya konflik teritorial yang terjadi di Sahara Barat. Selain itu, penulis juga menjelaskan mengenai peranan dari MINURSO untuk memahami mekanisme operasi pemeliharaan perdamaian dan menemukan faktor-faktor yang membawa keberhasilan atau kegagalan kasus-kasus terkait konflik ini. Penulis juga akan menyertakan berbagai *literature review* untuk memperkuat latar belakang penelitian dari penulis

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menjabarkan karya tulis ilmiah terdahulu yang memiliki pembahasan yang berkaitan dan memiliki hubungan terkait dengan topik yang diambil dalam penulisan ini. Karya tulis ilmiah yang penulis gunakan sebagai bahan tinjauan pustaka adalah skripsi, dan jurnal ilmiah. Selain itu untuk mempermudah dalam melakukan penulisan, penulis mencantumkan kerangka pemikiran dan alur pemikiran. Terakhir, penulis juga mencantumkan asumsi yang merupakan landasan penulisan yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Metode penelitian digunakan untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data dan menyelesaikan penelitian. Metode penelitian sendiri terdiri atas jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV LATAR BELAKANG SEJARAH MENGENAI SENGKETA WILAYAH SAHARA BARAT

Bab ini membahas mengenai bagaimana sejarah dan juga awal mula terjadinya konflik antara Maroko dan Saharawi Barat dalam sengketa teritorial dalam *status quo* wilayah Sahara

Arlan Faris, 2023

PBB DAN KONFLIK DI MAGHREB: Inefektivitas United Nations Mission For The Referendum In Western Sahara (MINURSO) Terkait Penyelesaian Konflik Di Sahara Barat Antara Kerajaan Maroko dan Frente Popular De Liberación De Saguía el Hamra y Río de Oro (Front POLISARIO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Barat. Pada bab ini juga akan menjelaskan bagaimana keterlibatan negara lain yang memperkeruh konflik Sahara Barat dan tindakan Maroko dalam memperkuat legitimasinya di wilayah ini serta bagaimana peranan POLISARIO sebagai entitas utama untuk memerdekakan Sahara Barat.

BAB V UPAYA MINURSO DAN TANTANGANNYA UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK SAHARA BARAT

Bab ini menjelaskan mengenai analisis mengenai peran yang diambil MINURSO semenjak terbentuk dan berbagai tantangan yang dihadapi oleh MINURSO dalam menjalankan mandat diplomatik-nya di dalam konflik Sahara Barat. Penulis akan menekankan dan menjelaskan mengapa referendum untuk Sahara Barat belum dapat tercapai hingga sekarang dan menjadi salah satu alasan tidak efektifnya *Peacekeeping Operation* PBB ini.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diharapkan berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arlan Faris, 2023

PBB DAN KONFLIK DI MAGHREB: Inefektivitas United Nations Mission For The Referendum In Western Sahara (MINURSO) Terkait Penyelesaian Konflik Di Sahara Barat Antara Kerajaan Maroko dan Frente Popular De Liberación De Saguía el Hamra y Río de Oro (Front POLISARIO)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]